

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN

AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap daftar nama Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
89 TAHUN 2021 TENTANG TIM
NARAHUBUNG REFORMASI
BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 153 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 JULI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan	Unit Organisasi	
Pengarah	Roni Dwi Susanto	Kepala LKPP	LKPP	
Ketua	Suharti	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
Anggota				
	1.	Mahfuzan Zakaria	Analisis Perencanaan	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2.	Sulmiari	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	3.	Atmojo Heri	Analisis Tata Usaha	
	4.	Ardian Hoppin Sitompul	Analisis Hukum	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	5.	Manshur Riadli	Analisis Kepegawaian Pertama	
	6.	Himawan Aditya Perdana	Auditor Pertama	Inspektorat

7.	Yosi Febriani	Widyaiswara Pertama	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
8.	Beta Romadiyanti	Widyaiswara Pertama	
9.	Eva Sinaga	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
10.	Yasmine Permata Sari	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	
11.	Rinatri Rahmayanti	Analisis Sistem Informasi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
12.	Rahmat Fitriadi Herman	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
13.	Adi Afrianto	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
14.	Desi Kartika	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
15.	Vialita Octaviani	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
16.	Prima Salti	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
17.	Galuh Arini Sasi Kirono	Analisis Sistem Informasi	
18.	Annisa Erviena Haniev	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Sertifikasi Profesi
19.	Lutfi Prafidya Ferisa	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

20.	Aisyah Khoirun Nisa	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
21.	Yustitia Fernando	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
22.	Jefry Seftian	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
23.	Tinta Nurvitania	Pengelola Data Monitoring Berkas Sengketa	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR
89 TAHUN 2021 TENTANG TIM
NARAHUBUNG REFORMASI
BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 153 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 JULI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Organisasi
1.	Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Dodi Wahyugi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3.	Rinaldi Morintosh	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4.	Yulia Dela Dacrea	Inspektorat
5.	Hardi Afriansyah	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
6.	Antonius Lambok Sihombing	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7.	Zulhenny	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Theodore Sutarto	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

9.	Mustika Rosalina Putri	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
10.	Erlangga Aninditya	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
11.	Fajar Adi Hemawan	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Januar Indra	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13.	Muhammad Firdaus	Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Selamet Budiharto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
15.	Tjipto Prasetyo Nugroho	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
16.	Ichwan Makmur Nasution	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO